DOSEN UNIMMA PRASOJO RAIH DOKTOR

Teliti Kepuasan Pasien di 11 RS

MAGELANG (KR) - Salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Prasojo Pribadi berhasil meraih gelar doktor di bidang Manajemen Farmasi dari Program Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Informasi yang diperoleh *KR* dari Bagian Humas Unimma menyebutkan, Prasojo menyampaikan disertasinya dalam sidang terbuka secara virtual yang dilaksanakan, Kamis (21/1).

KR- M Thoha

Dr Prasojo Pribadi

Dalam disertasinya, Prasojo menyebutkan, konsep kepuasan pasien telah banyak mendapat perhatian dalam industri layanan kesehatan. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus kepada kinerja pelayanan sebagai konstruksi utama untuk menjelaskan kepuasan pasien.

Dengan promotor Prof Dr apt Satibi MSi, Dr Ir Suci Paramitasari S MM dan Dr apt Susi Ari Kristina MPH, Prasojo memaparkan, penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif (*monomethods*) yang dilakukan di 11 rumah sakit (RS) di DIY, baik RS pemerintah maupun swasta.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 897 pasien rawat jalan peserta BPJS maupun asuransi swasta. Penelitian ini melalui beberapa tahapan untuk menjamin validitas-reliabilitas instrumen dan kemampuan prediktif yang baik dari model yang dikembangkan.

Menurut Prasojo, penelitian tersebut telah berhasil mengembangkan model dan instrumen pengukuran anteseden kepuasan pasien rawat jalan rumah sakit yang terdiri 10 dimensi, yaitu aspek fisik, pelayanan medis, pelayanan farmasi, prosedur administratif, tanggungjawab sosial, kualitas personel, aspek biaya dan asuransi kesehatan, kualitas hasil, emosi positif dan emosi negatif. **(Tha)**

TERDAMPAK COVID-19

Lebih 16.000 Mahasiswa Dapat Bantuan

YOGYA (KR) - Dalam masa pandemi ini terdapat 12.211 mahasiswa terdampak Covid-19 yang mendapatkan bantuan pemerintah melalui LLDikti Wilayah V. Mereka mendapatkan bantuan SPP sesuai aturan negara, Rp 2,4 juta. Bantuan tersebut dapat dikonotasikan sebagai diskon SPP di peguruan tinggi swasta (PTS), karena SPP lebih besar daripada itu, per semester. Jumlah mahasiswa Wilayah V mencapai sekitar 250.000 orang.

Ketua LLDikti Wilayah V Prof Dr Didi Achjari dan Ketua Aptisi Wilayah V Prof Fathul Wahid PhD mengemukakan hal tersebut dalam pertemuan pers di aula LLDikti Jl Tentara Pelajar, Kamis (28/1) siang. Pertemuan pers diselenggarakan terkait dibukanya kembali penerimbaan mahasiswa baru lintas kampus swasta dalam satu situs : Jogjaversitas.id. "Sementara dari mahasiswa baru terdapat 4.157 yang mendapat bantuan dengan program bidik misi. Total lebih dari 16.000," jelasnya.

Didi mengakui, bantuan itu tidaklah cukup untuk membayar SPP dan lainnya. "Kalau yang ilmu sosial mungkin cukup. Tapi bagi yang eksakta, yang harus praktikum dan lainnya, masih cukup berat," jelasnya. Meski demikian diharapkan semester berikutnya masih tetap ada anggaran dengan alokasi yang lebih besar.

Sedang Fathul Wahid menyebutkan, tahun 2020-2021 Jogjaversitas.id diikuti 349 program studi dari 72 PTS dan berhasil menarik 1.919 pendaftar dari pelbagai wilayah di Indonesia. "Dari laporan dan catatan kami, tingkat keterisian mencapai 84,3%. Ini cukup menarik, karena waktunya singkat dan harapan PTS hanya akan mampu 50% saja. Tapi keterisian ini rata-rata mampu mencapai 84,3%. Artinya, kerja sama ini memberi harapan," ujarnya sembari berharap tahun depan jumlah prodi dan PTS yang bekerja sama akan bertambah.

Dilaporkan, tahun ajaran lalu terdapat 5 program studi yang mendapat animo tertinggi yakni psikologi, manajemen, akutansi, hukum dan ilmu pemerintahan. Sementara, tiga perguruan tinggi yang mendapatkan cacah pendaftar terbanyak adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. **(Fsy)**

BOS Madrasah Swasta Lewat Ditjen Pendidikan Islam

JAKARTA (KR) - Ditjen Pendidikan Islam Kemenag telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Raudlatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tahun Anggaran 2021. Juknis ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 6572 Tahun 2020 tertanggal 23 November 2020.

Mulai tahun depan, penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan Ditjen Pendidikan Islam. Selama ini, proses penyaluran BOS didistribusikan melalui Kanwil Kemenag Provinsi atau Kankemenag Kab/Kota. "Tahun 2021, penyaluran dana BOS pada madrasah swasta, baik MI, MTs, Madrasah Aliyah (MA), maupun Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam up Direktorat KSKK Madrasah," kata Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdani, Kamis (27/11).

Untuk penyaluran Dana BOP pada RA dan Dana BOS pada MIN, lanjutnya, tetap dilakukan Kanwil Kemenag Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Demikian halnya dengan penyaluran Dana BOS pada MTsN, MAN dan MAKN, tetap dilakukan Satuan Kerja Madrasah Negeri yang bersangkutan.

"Demi menunjang pembelajaran jarak jauh, dana BOP dan BOS dapat digunakan untuk biaya paket data siswa maksimal 150.000 perbulan/ siswa, sedangkan untuk guru dan tenaga kependidikan maksimal 200.000 perorang perbulan dengan ketentuan siswa, guru dan tenaga kependidikan madrasah tersebut tidak sedang mendapatkan bantuan sejenis yang bersumber dari APBN," jelas Ramdani.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ahmad Umar menambahkan, satuan Biaya BOP dan BOS tahun ini sama dengan 2020. Untuk BOP RA sebesar Rp 600.000 untuk setiap peserta didik dalam satu tahun. Dana BOS MI sebesar Rp 900.000, MTs Rp 1,1 juta serta MA dan MAK sebesar Rp 1,5 juta untuk setiap siswa dalam setahun.

Dijelaskan Umar, mulai 2021, Kemenag memberlakukan piloting penerapan e-RKAM dalam pengelolaan dana BOS. Percontohan ini diterapkan di 12 Provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Kalimantan Timur. Total ada 15.422 madrasah yang tersebar di 194 Kabupaten/Kota. **(Ati)**

Asesmen Nasional Tetap Dilaksanakan

JAKARTA (KR) - Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan tetap melaksanakan Asesmen Nasional (AN). Sebab kalau tidak, tak bisa menghitung ancaman *learning loss* (kemampuan penurunan belajar) dan mengetahui mana saja sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan.

"Inilah yang diinginkan Kemendikbud dan DPR," jelas Mendikbud, Rabu (27/1) di Jakarta. Menurutnya, AN bukan evaluasi individu siswa dan tidak ada konsekuensi untuk siswa. AN bukan untuk menambah beban siswa dan bukan sebagai salah satu syarat dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, AN dirancang untuk memperbaiki sistem pendidikan dasar dan menengah. Di sisi lain, evaluasi kompetensi peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan sekolah.

Perlu diketahui, AN merupakan Asesmen Kompetensi Minimum yang terdiri literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Oleh karena itu, AN berguna untuk membantu sekolah memperbaiki performa layanan pendidikannya menjadi lebih baik. "AN bukan untuk menghukum sekolah," ujar Mendikbud.

Anggota Komisi X Fraksi PDIP Sofyan Tan menilai, AN adalah solusi yang baik bagi Kemendikbud untuk melihat kondisi pendidikan dan bagaimana cara membenahinya. Namun ia mengatakan, sosialisasi AN perlu dilakukan lebih masif agar seluruh stakeholder pendidikan memahami tujuannya dan dapat ikut mensukseskan program tersebut. "Program ini sangat baik, tetapi dengan catatan, masih ada beberapa pihak punya cara pandang yang berbeda. Karena AN masih kurang sosialisasi, mohon ditingkatkan," pesan Sofyan.

Adapun isu strategis lainnya yang turut dibahas selain AN di antaranya adalah realisasi APBN Kemendikbud Tahun Anggaran (TA) 2020, persiapan program dan anggaran Kemendikbud TA 2021 serta isu-isu strategis lainnya seperti persiapan pembelajaran tatap muka serta bantuan subsidi upah pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, dibahas pula perkembangan penyusunan Revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Target pelaksanaan AN diubah menjadi September-Oktober 2021. Hal ini untuk memastikan agar persiapan logistik, infrastruktur dan protokol kesehatan lebih optimal. Di samping itu, juga digunakan untuk mensosialisasikan dan berkoordinasi lebih masif dengan pemerintah daerah. **(Ati)**

EKONOMI

Undian IndiHome Miliarder Periode Q4

KR-Istimewa

Pemenang Program Loyalty IndiHome Miliarder Periode Q4.

YOGYA (KR) - Telkom Witel Yogyakarta kembali mengundi pemenang Program Loyalty IndiHome Miliarder Periode Q4 Tahun 2020, Oktober-Desember 2020 secara serentak di semua wilayah Telkom Regional. Penyerahan hadiah berlangsung di Plasa Telkom Yogyakarta Jalan Yos Sudarso No 09 Kotabaru Yogyakarta, Rabu (27/1), dihadiri General Manager (GM) dan Deputi GM serta Manager HHome Service (HS) Witel Yogyakarta.

Pada undian Q4 ini, ada empat pemenang yang mendapatkan Rp 10 juta dan satu pemenang grandprize senilai Rp 80 juta. GM Witel Yogyakarta Fera mengatakan, Program loyalty ini merupakan bentuk apresiasi dari Telkom kepada pelanggannya. "Secara berkala, Telkom memang melakukan undian grandprize. Kami memberikan apresiasi kepada pengguna IndiHome yang memberi banyak masukan," jelasnya. **(Feb)**

Terdampak Pandemi, Kondisi Keuangan Daerah Abnormal

YOGYA (KR) - Pemda DIY tidak mengubah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tetapi hanya mengubah sasaran dan program target kinerjanya. Salah satu target nasional kinerja yang disesuaikan adalah angka kemiskinan DIY menjadi 8,25 persen pada 2022. Tetapi faktanya, angka kemiskinan di DIY masih sebesar 12,28 persen pada Maret 2020 yang ditahan menjadi angka konservatif di masa pandemi Covid-19.

"Kita berupaya agar angka kemiskinan DIY tidak meningkat dengan mempertahankan dari angka 12 persen menuju 11 persen saja sudah luar biasa. Secara mandatorynya, target angka kemiskinan Pemda DIY menuju 7 persen pada 2022. Namun akhirnya kita sesuaikan menjadi sekitar 12 persen meskipun pemerintah pusat memberi target 8,25 persen pada 2022 karena pandemi Covid-19," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimosono Kepatihan, Kamis (28/1).

Beny menuturkan kondisi makro perekonomian DIY mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 sejak Triwulan I hingga Triwulan III 2020 sesuai yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY maupun Bank Indonesia (BI) DIY. Sedangkan capaian pertumbuhan ekonomi DIY pada Triwulan IV 2020 secara resmi belum mampu digambarkan karena memang masih dalam proses kajian.

"Pertumbuhan ekonomi DIY di masa pandemi sampai Triwulan III 2020 yang meningkat tajam dialami jasa kesehatan 21,8 persen (yoy), diikuti informatika dan komunikasi (infokom) lalu sektor pertanian. Jika dilihat secara kuartal hingga Triwulan III 2020 lalu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha yaitu akomodasi dan makan minum, kemudian jasa lainnya serta jasa perusahaan," jelasnya

Beny menegaskan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi DIY hingga Triwulan III 2020 lalu mengakibatkan turunnya sedikit level Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY sebesar -0,03 persen menjadi 79,97. Penurunan IPM DIY pada 2020 tersebut disebabkan standar kehidupan yang layak sedikit menurun akibat penurunan daya beli selama masa pandemi Covid-19. Perkembangan IPM ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik di DIY. **(Ira)**

Vaksinasi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA (KR) - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 bisa mencapai level 4,5 - 5,5 . Serta pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen.

Sementara lembaga internasional seperti IMF memproyeksi ekonomi Indonesia di 2021 paling mentok tumbuh di level 4,8 persen. Sementara China diperkirakan bakal tumbuh 8,1 persen pada 2021 dan 5,6 persen di 2022. Ekonomi India akan tumbuh sebesar 11,5 persen tahun ini dan 6,8 persen tahun depan. Sementara ekonomi dunia di tahun ini akan tumbuh 5,5 persen, perdagangan dunia tumbuh 8,5 persen , ASEAN tumbuh 7,5 persen.

"Berbagai lembaga sudah mengatakan bahwa pertumbuhan Indonesia di 2021 itu antara 4,4-4,8 persen dan Indonesia sendiri memperkirakan 4,5-5,5 persen," kata Airlangga dalam seminar daring yang diadakan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI), Rabu (27/1).

Airlangga optimis pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dicapai karena sudah adanya vaksin yang perlahan siap disuntik ke masyarakat. Dengan adanya vaksin bisa meningkatkan kepercayaan hingga akhirnya dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat bisa bergerak lagi. **(Lmg)**

Mandiri Sekuritas Dorong Investasi ORI019

JAKARTA (KR) - PT Mandiri Sekuritas (Mandiri Sekuritas/Perusahaan) mendorong masyarakat untuk berinvestasi sekaligus berkontribusi pada negara melalui Obligasi Negara Ritel seri 019 (ORI019) sebagai resolusi di tahun 2021. Dengan berinvestasi di ORI019, nasabah akan berperan langsung dalam pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, ORI019 juga memberikan banyak manfaat bagi investor antara lain, menjaga nilai aset dengan kupon tetap (fixed rate) 5,57 persen pertahun yang di atas suku bunga acuan sebesar 3,75 persen, berpotensi memberikan imbal hasil karena dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah 1 kali pembayaran kupon (minimum holding period) serta serta memiliki fleksibilitas karena dapat dijaminkan kepada pihak lain.

"Masyarakat Indonesia secara langsung turut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 termasuk membiayai penanganan pandemi Covid-19, diantaranya untuk program vaksinasi dengan berinvestasi pada ORI019," ujar Direktur Retail and Treasury Mandiri Sekuritas Theodora VN Manik dalam surat elektroniknya, Kamis (28/1).

Menurut Theodora, kehadiran ORI019 juga memudahkan masyarakat untuk melakukan diversifikasi dalam pengelolaan aset investasi mereka. **(Ira)**

Info Bank Jateng

BANK JATENG MEMASUKI 2021: MEMBANGUN SINERGI

Prestasi ULM Bank Jateng Membanggakan

BANK Jateng dengan reputasi sebagai development bank, mempunyai tanggung jawab moril yang tidak ringan dalam pengembangan usaha Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Langkah yang ditempuh berusaha melaksanakan misi ketiga yang dicanangkan yakni mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail Banking. Implementasinya dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM di seluruh cabang se-Jawa Tengah.

Dr Supriyatno MBA

Unit Layanan Mikro Bank Jateng yang didirikan sejak Februari 2017 dan kini mendekati usia 4 tahun, telah memiliki unit layanan mikro di 14 area besar. Ke-14 area tersebut berhasil membawahi 74 Unit di seluruh cabang dan cabang pembantu se-Jawa Tengah dengan jumlah personel 542 orang. Misinya, mengelola Kredit Mitra Jateng 75, Mitra Jateng 500 dan KUR.

Hingga Januari 2021, total kredit yang disalurkan untuk UMKM mencapai Rp 2,406 triliun dengan Baki Debet mencapai Rp 2,015 triliun. jumlah debitur yang terlayani 14.680 orang pelaku UMKM. Dari jumlah nasabah tersebut yang masuk kategori nasabah bermasalah (NPL) hingga akhir Desember 2020 sebesar 0,31 persen dari total pencairan.

Dari realitas data tersebut menunjukkan rata-rata dari 200 pelaku UMKM hanya 1 orang yang bermasalah (RR 99,60%). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Jateng telah berhasil menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan UMKM dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian tingggi.

Bank Jateng bernisiatif pendirian ULM sejak Pebruari 2017, dengan proyeksi sebagai mesin pertumbuhan baru untuk melayani UMK. Selain itu Bank Jateng tetap mermaksimalkan pelayanan kepada nasabah dari kalangan PNS/ASN di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten dan kota se Jawa Tengah. Inisiatif ULM tersebut merupakan komitmen bank Jateng sebagai Bank Pembangunan dalam upaya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Tengah.

Rencana ke depan untuk Unit Layanan Mikro Bank Jateng akan mendirikan di setiap cabang dan cabang pembantu di seluruh Jawa Tengah. Dalam program ini diperkirakan didirikan 166 unit. Target sasarannya agar dapat memaksimalkan pelayanan hingga menjangkau ke kecamatan-kecamatan dan harapannya akan semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati fasilitas kredit Mitra Jateng dan KUR. Desain ini diarahkan sebagai salah satu upaya agar perekonomian Jawa Tengah mampu bangkit secara dinamis di masa pandemi Covid-19.

Inisiatif Unit Layanan Mikro (ULM) yang dikembangkan Bank Jateng berjalan sukses tidak lepas dari dukungan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah di awal tahun 2020. Hingga tercatat jumlah UMKM di Jawa Tengah saat ini mencapai 4.174.210 unit. Dari jumlah itu, untuk usaha besar tercatat 3.358 unit, usaha menengah 39.125 unit dan usaha kecil 354.884 unit, sedangkan usaha mikro mencapai 3.776.843 unit. Dari jumlah tersebut posisinya kira-kira baru separoh yang telah dibiayai perbankan. Bank Jateng melihat hal Ini merupakan potensi yang cukup besar sekaligus menjadi PR bersama bagi kalangan perbankan di Jawa Tengah tak terkecuali Bank Jateng.

Pasar UMKM adalah pasar yang unik, di mana setiap tahun akan selalu tumbuh start up baru, dan akan selalu membutuhkan modal kerja. Jadi boleh dikatakan jumlah pasar kredit untuk UMKM tidak akan pernah habis dan akan selalu tumbuh, seperti juga ULM Bank Jateng yang akan terus tumbuh untuk melayani UMKM di Jawa Tengah.

(Disampaikan Direktur Utama Bank Jateng Dr Supriyatno MBA kepada Wartawan KR Isdiyanto Isman)

Bank Jateng
Banknya Orang Jawa Tengah
Bank Jateng Call Center 14066
www.bankjateng.co.id